



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI**  
**KE PT BUKIT ASAM (TBK) DI PALEMBANG PROVINSI SUMATERA**  
**SELATAN**

**PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**TANGGAL 20 - 22 JANUARI 2022**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI**  
**KE PT BUKIT ASAM (TBK) DI PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**TANGGAL 20 - 22 JANUARI 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Investasi telah melakukan kunjungan kerja spesifik pada tanggal 20 – 22 Januari 2022 ke Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendapatkan gambaran dan penjelasan dari BUMN PT Bukit Asam (Tbk) atau disingkat PTBA, terkait klaim pencapaian kinerja perusahaan hingga Januari 2022, bersama dengan seluruh anak usahanya baik yang direct seperti PT Bukit Asam Transpacific, PT Huadian Bukit Asam Power, PT Bukit Asam Methana Enim, PT Bukit Asam Methana Ombilin, PT Bukit Energi Metana, PT Bukit Multi Investama, PT Batubara Bukit Kendi dan lainnya, serta yang indirect seperti International Prima Coal dan BAP.

Selain itu Komisi VI telah menjalankan fungsi pengawasan terkait

pelaksanaan transformasi bisnis PTBA dari perusahaan tambang batubara menjadi perusahaan penyedia energi listrik. Jika sebelumnya hanya menjual batubara sebagai sumber energi, maka sejak 2013. Terutama terkait penjualan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dimiliki PTBA, serta peran PTBA dalam menyediakan listrik 5.000 MW atau sekitar 15% dari total kapasitas program kelistrikan 35.000 megawatt nasional. Serta kerjasama dengan perusahaan lainnya seperti Huadian dan Inalum.,

## **B. Objek Kunjungan Kerja.**

Tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik adalah Kota Palembang, Sumatera Selatan.

## **C. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja**

Secara umum kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan dari PTBA tentang dampak dari kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui surat Ditjen Minerba Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021, resmi melarang perusahaan pertambangan batubara untuk melakukan kegiatan ekspor batubara.

Kebijakan ini berlaku dari 1 hingga 31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B.. Terlebih saat ini PTBA sedang menggenjot produksi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tengah terdampak pandemi COVID-19.

Komisi VI DPR RI juga ingin melihat apakah PTBA, tetap memprioritaskan pasar domestik, khususnya PLN Grup guna memberikan dukungan secara optimal untuk pasokan kebutuhan energi dalam negeri di sisi lain tetap berupaya memperluas pangsa pasar ekspor. Terlebih di saat indeks harga batubara rebound (meningkat) di akhir tahun 2020 hingga saat ini.

Secara lebih khusus, kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui komitmen PTBA memasok batubara ke PLN. Bagaimana realisasi pasokan

batubara setiap bulan ke PLN sesuai peraturan kewajiban persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO).

Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Investasi telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Palembang, Sumatera Selatan terkait perkembangan pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, yang telah dilaksanakan pada tanggal 20-22 Januari 2022.

#### D. Agenda Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan ini dilaksanakan dengan agenda pertemuan dengan PTBA dan para pemangku kepentingan antara lain dari Kementerian BUMN.

#### E. Anggota Tim Kunjungan Kerja

Anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1	A-352	MARTIN MANURUNG, SE, MA	KETUA TIM/ F. NASDEM
2	A-103	MOHAMAD HEKAL, MBA	PIMPINAN/F.GERINDRA
3	A-33	FAISOL RIZA, SS	PIMPINAN/F.PKB
4	A-161	DARMADI DURIANTO	F.PDIP
5	A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	F.PDIP
6	A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M.Si	F.PDIP
7	A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F.PDIP
8	A-208	dr. H. MUFTI A.N, ANAM	F.PDIP
9	A-274	Ir. H.M. IDRIS LAENA	F.PG
10	A-302	NUSRON WAHID	F.PG
11	A-305	H. SINGGIH JANURATMOKO, SKH, MM	F.PG
12	A-65	ANDRE ROSIADE	F.GERINDRA
13	A-115	KHILMI	F. GERINDRA
14	A-135	HENDRIK LEWERISSA, SH, LLM	F. GERINDRA
15	A-128	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH, MH	F.GERINDRA
16	A-353	H. RUDI HARTONO BANGUN, SE, MAP	F. NASDEM
17	A-361	ZURISTYO FIRMAPATA, SE, MM	F.NASDEM
18	A-19	MARWAN JA'FAR	F.PKB
19	A-16	Drs. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si	F.PKB
20	A-544	DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	F.PD
21	A-554	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc	F.PD
22	A-409	RAFLI	F,PKS
23	A-500	DAENG MUHAMMAD,	F.PAN
24	A-499	Hj. INTAN FAUZI, SH, LLM	F.PAN

## II. HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Sejak 2020 PT Bukit Asam (PTBA) mampu menyuplai batubara ke PT PLN (Persero) lebih dari *Domestic Marketing Obligation* (DMO) yang ditentukan pemerintah. Peraturan Menteri (Permen) terkait DMO menyebutkan bahwa kewajiban perusahaan batubara nasional menjual 25 persen dari total produksi kepada PLN per tahun. Sedangkan realisasi PTBA kepada DMO PLN Group sebanyak 11,56 juta ton dari ketentuan DMO yang diberikan kepada PTBA sebesar 7,5 juta ton atau sebesar 154%.

Kepada Komisi VI DPR Dirut PT Bukit Asam (Tbk), Arsal Ismail juga menyampaikan dan menunjukan secara langsung ketersediaan stok batubara di BUMN tersebut. Diungkapkan, PTBA menjadi salah satu pemasok atau penyuplai batubara untuk PLN yang sebagaimana diketahui belakangan mengalami kekurangan stok batubara sebagai bentuk kerjasama mendukung ketahanan energi.

Komisi VI DPR RI mengapresiasi capaian tersebut dan berharap agar PT perusahaan lain bisa meniru langkah positif PT Bukit Asam (Tbk) yang telah menjalankan kewajiban (bahkan melebihi) DMO yang ditetapkan. Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti temuan tersebut sekaligus menyampaikan kepada pemerintah agar PT Bukit Asam diberikan kesempatan ekspor batubara.

Sebab kebijakan pelarangan ekspor beberapa waktu lalu dinilai sangat mempengaruhi PT Bukit Asam dan beberapa perusahaan lain yang sudah menjalankan kewajibannya. Bukan tidak mungkin hal tersebut juga akan mempengaruhi kepercayaan perusahaan lain terhadap PT Bukit Asam. Bahkan hal ini juga mempengaruhi kepercayaan negara lain terhadap Indonesia.

Dalam kesempatan Kunjungan Kerja tersebut, Komisi VI DPR RI mendukung rencana proyek pengembangan bisnis PT Bukit Asam yang akan mengganti LPG (Liquefied Petroleum Gas) impor dengan DME (*dimethyl ether*) dari batubara.

Dari penjelasan PT Bukit Asam (Tbk) kepada Komisi VI DPR RI pada saat kunjungan kerja spesifik ini dilakukan, terungkap bahwa:

1. PT Bukit Asam (Tbk) mendukung kebijakan diversifikasi energi oleh pemerintah dengan:

- a. Menjalankan rencana PT Bukit Asam yang akan mengganti LPG impor dengan DME yang berasal dari batubara. Dengan catatan rencana tersebut dipelajari secara mendalam dari berbagai aspek dan didiskusikan di berbagai forum. Agar jangan sampai rencana itu nantinya malah akan menjadi bumerang yang merugikan PT Bukit Asam itu sendiri. Pasalnya sebagaimana diketahui untuk mengganti LPG impor ke DME batubara itu, selain membutuhkan teknologi dan investasi atau biaya yang cukup tinggi.
  - b. DME merupakan hasil dari gasifikasi batubara berkalori rendah yang direncanakan akan menggantikan LPG yang selama ini diimpor dari negara lain. Rencana utama proyek ini sejatinya ditujukan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Selain itu juga untuk menghemat cadangan devisa dan neraca perdagangan negara dengan mengurangi LPG impor kurang lebih sekitar 1 juta ton per tahun.
  - c. Proyek DME juga akan menghasilkan *multiplier effect* berupa penerimaan pajak dan non pajak bagi negara. Kekhawatiran bahwa rencana tersebut akan merugikan PT Bukit Asam, ditepis PTBA dengan menyatakan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Karena proyek dengan teknologi tinggi ini bekerjasama dengan PT Pertamina dan perusahaan asing (*Air Products*). Tentu manfaat, kewajiban dan risiko yang akan dijalankan atau diterima masing-masing pihak. Dimana PT Bukit Asam hanya menyediakan bahan utamanya berupa batubara.
2. Komisi VI DPR RI mengapresiasi PT Bukit Asam (Tbk) dalam menyikapi kecukupan pasokan batubara nasional :
- a. Komisi VI DPR RI mendapatkan informasi kecukupan stok batubara yang ada di PTBA termasuk penjelasan secara langsung bahwa selama ini PT Bukit Asam mampu menyuplai batubara ke PLN sebesar 154 persen dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. .
  - b. Walaupun PTBA adalah BUMN yang patuh terhadap peraturan DMO namun setelah dipenuhi kewajiban DMO tersebut maka harga penjualan dengan PLN direkomendasikan dapat dibicarakan kembali dengan PLN agar bisa sesuai dengan harga pasar dengan dasar saling menguntungkan, agar kedua BUMN tersebut baik PLN maupun PTBA

tidak rugi

- c. Komisi VI DPR RI akan membahas ketentuan DMO yang lebih adil agar perusahaan batubara seperti PTBA tidak dirugikan

### III. REKOMENDASI

1. Komisi VI DPR RI mendorong PT Bukit Asam sebagai salah satu BUMN yang dapat mengembangkan bisnisnya ke arah energi yang lebih ramah lingkungan dan bahkan energi non-fosil, agar mampu membawa manfaat dan keuntungan lebih bagi negara dan generasi penerus. Terlebih lagi dalam paparannya kepada Komisi VI DPR RI, PTBA mencatatkan laba bersih 7,0 triliun Rupiah tentu ada harapan tersendiri untuk bisa lebih mengembangkan dan memajukan BUMN PT Bukit Asam ini.
2. Perlu ada kajian model bisnis PTBA dengan menggunakan konsultan yang handal agar transformasi bisnis PTBA dapat terus berlanjut mengingat stok batubara tidak selamanya ada (akan habis).
3. Komisi VI DPR RI merekomendasikan agar lingkup bisnis PTBA dibawah holding Mind ID bisa lebih tinggi dari saingannya dari sektor swasta (PT Adaro) dengan menerapkan target pencapaian kinerja yang terukur salah satunya disarankan ke arah penyedia tenaga listrik berbasis energi non-fosil.
4. Mengingat tambang batubara yang dikelola oleh PTBA tidak sebesar tambang-tambang lain yang dikelola swasta, dan banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak dikelola secara produktif. Bahkan ditengarai ada 57 IUP yang dikuasai oleh satu orang. Serta mengingat momentum pemerintah saat ini mengambil tindakan tegas mencabut sekitar 2000 IUP yang tidak produktif maka ada baiknya IUP tersebut dapat diambil alih oleh PTBA bekerja sama dengan swasta lain yang sanggup. Komisi VI DPR mendukung pengambil-alihan IUP yang tidak produktif oleh PTBA.
5. Komisi VI DPR RI mendorong PTBA agar menjawab issue internasional tentang dekarbonisasi, *climate change* dan perusakan lingkungan. Komisi VI DPR belum melihat ada desain yang ampuh dan solid di Mind ID untuk

membalikan opini negatif tersebut. Untuk itu direkomendasikan PTBA beserta Mind ID membuat jawaban terhadap issue issue negatif tersebut.

**KETUA TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI VI DPR RI  
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TTD.**

**MARTIN MANURUNG, SE, MA  
A. 352**



## LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI berfoto bersama se usai diskusi pendalaman dengan PT Bukit Asam (Tbk)



Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mendapatkan cinderamata se usai berdialog dengan pimpinan PT Bukit Asam (Tbk)



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI saat meninjau lokasi pengangkutan batubara Unit Dermaga Kertapati, Provinsi Sumsel bersama Direksi PTBA dan Perwakilan dari Kementerian BUMN



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI berfoto bersama di depan kantor Unit Dermaga Kertapati bersama jajaran Direksi PT Bukit Asam (Tbk)

\*\*\*